

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
1.5 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB II ANALISIS DATA SKM	8
2.1 Analisis Responden	8
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....	9
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	11
2.4 Tren Nilai SKM.....	13
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	14
BAB IV KESIMPULAN	16
LAMPIRAN.....	17
1. Kuesioner.....	17
2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM).....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data.....	5
Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM.....	7
Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden	7
Tabel 2.1 Analisis Responden.....	8
Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	9
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut.....	12
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)	14
Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

DINAS SOSIAL menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

- Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

- Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
- Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
- Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
- Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan DINAS SOSIAL dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan pada karakteristik setiap layanan untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode secara online demi menjangkau seluruh segmen pengguna layanan secara efektif. Rincian metode survei yang digunakan untuk setiap jenis layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data

No	Jenis Layanan	Metode Survei
1	Layanan Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin	online
2	Layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	online
3	Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial	online
4	Layanan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	online
5	Layanan Pengaduan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	online
6	Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	online
7	Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi PPKS Di Dalam Panti, Disabilitas, dan Lanjut Usia Tunggal	online
8	Pelayanan Rekomendasi Pengembangan Usaha Dan Pelatihan Usaha Bagi PPKS	online
9	Pemberian Bantuan Alat Bantu Berupa Kursi Roda, Kaki Palsu, Kruk, Alat Bantu Dengar Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia Yang Berindentitas Kabupaten Sukoharjo	online

Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

- Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk alur pengaduan.
- Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenisnya.
- Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Perilaku Pelaksana: Sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
- Sarana dan Prasarana: Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk DINAS SOSIAL dilakukan secara periodik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Periode pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan selama TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026). Keseluruhan proses, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, memerlukan waktu selama 1 bulan. Rincian tahapan dan alokasi waktu kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	23 Feb 2026 - 27 Feb 2026	5
2	Pengumpulan Data	01 Feb 2026 - 14 Mar 2026	42
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	16 Mar 2026 - 17 Mar 2026	2
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	25 Mar 2026 - 31 Mar 2026	7

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap jenis layanan didasarkan pada populasi masing-masing. Untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif, jumlah minimum responden ditetapkan menggunakan metode yang mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki jumlah responden yang memadai secara statistik untuk menghasilkan data yang akurat. Rincian populasi dan target sampel minimum untuk setiap layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Sampel Minimum
1	Layanan Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin	6	10
2	Layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	30	28
3	Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial	40	36
4	Layanan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10	10
5	Layanan Pengaduan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	40	36
6	Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	10	10
7	Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi PPKS Di Dalam Panti, Disabilitas, dan Lanjut Usia Tunggal	10	10
8	Pelayanan Rekomendasi Pengembangan Usaha Dan Pelatihan Usaha Bagi PPKS	10	10
9	Pemberian Bantuan Alat Bantu Berupa Kursi Roda, Kaki Palsu, Kruk, Alat Bantu Dengar Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia Yang Beridentitas Kabupaten Sukoharjo	10	10
Total		166	160

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Analisis terhadap karakteristik responden bertujuan untuk memahami latar belakang dan profil dari para pengguna layanan. Pada periode survei ini, data berhasil dikumpulkan dari total 201 responden. Profil demografis responden, yang mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Responden

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	87	43.28%
		Perempuan	114	56.72%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	7	3.48%
		SD/Sederajat	13	6.47%
		SMP/Sederajat	32	15.92%
		SMA/Sederajat	67	33.33%
		D1/D2/D3	15	7.46%
		D4/S1	63	31.34%
		S2	4	1.99%
		S3	0	0%
3.	Pekerjaan	ASN	34	16.92%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	30	14.93%
		Wirausaha	10	4.98%
		Ibu Rumah Tangga	62	30.85%
		Pelajar/Mahasiswa	1	0.5%
		Petani/Nelayan	3	1.49%
		Pekerja Lepas/Freelance	3	1.49%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	40	19.9%
	Perangkat Desa	18	8.96%	
4.	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	172	85.57%
		Disabilitas	29	14.43%
5.	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	21	10.45%
		Disabilitas Mental	7	3.48%
		Disabilitas Intelektual	1	0.5%
		Disabilitas Sensorik	1	0.5%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

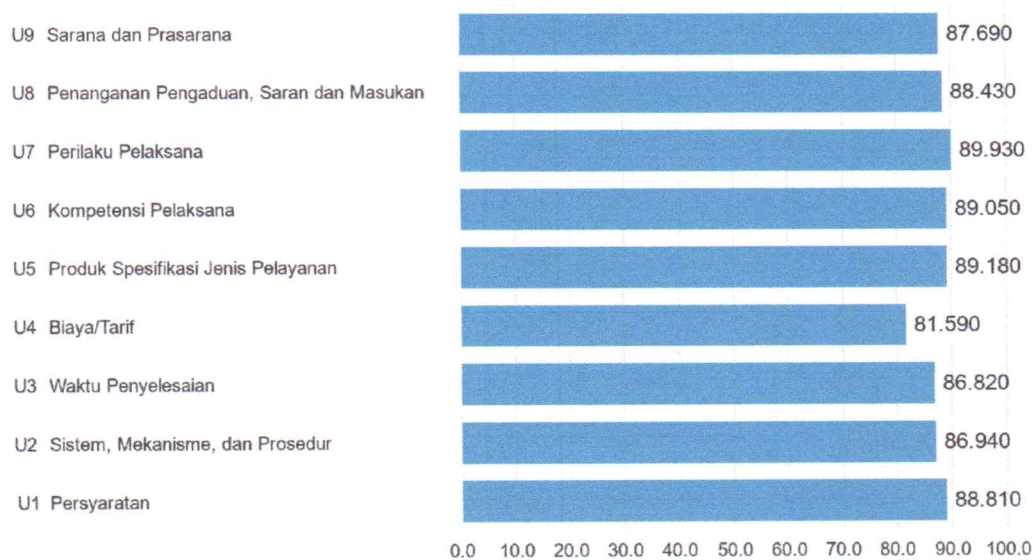
Setelah menganalisis profil responden, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terperinci. Tabel berikut ini menguraikan capaian nilai IKM untuk setiap jenis layanan yang disurvei, beserta rincian nilai rata-rata untuk masing-masing dari sembilan unsur pelayanan.

Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpas	IKM Per Jenis Layanan
1	Layanan Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin	25	88.00	85.00	85.00	76.00	87.00	86.00	91.00	86.00	85.00	85.44
2	Layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	34	91.18	89.71	87.50	84.56	89.71	90.44	87.50	89.71	90.44	89.00
3	Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial	45	90.56	90.56	90.00	85.56	90.56	91.11	90.56	90.56	89.44	89.83
4	Layanan Pemberitan Tanda Daftar Kesejahteraan Sosial (LKS)	11	84.09	84.09	81.82	79.55	84.09	84.09	86.36	84.09	84.09	83.50
5	Layanan Pengaduan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	40	90.00	87.50	88.13	78.75	91.25	91.25	92.50	91.25	88.13	88.78
6	Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	10	80.00	77.50	80.00	82.50	85.00	85.00	85.00	82.50	85.00	82.50
7	Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi PPKS Di Dalam Panti, Disabilitas, dan Lanjut Usia Tunggal	11	81.82	81.82	84.09	84.09	90.91	88.64	90.91	84.09	81.82	85.33
8	Pelayanan Rekomendasi Pengembangan Usaha Dan Pelatihan Usaha Bagi PPKS	11	88.64	84.09	81.82	72.73	84.09	84.09	90.91	86.36	88.64	84.58

9	Pemberian Bantuan Alat Bantu Berupa Kursi Roda, Kaki Palsu, Kruk, Alat Bantu Dengar Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia Yang Beridentitas Kabupaten Sukoharjo	14	91.07	85.71	89.29	85.71	91.07	89.29	89.29	87.50	87.50	88.47
	Rerata IKM Per Unsur		88.81	86.94	86.82	81.59	89.18	89.05	89.93	88.43	87.69	87.60
	IKM Unit Layanan		87.60									
	Mutu Unit Layanan		Baik (B)									

Grafik Nilai IKM Agregat per Unsur



Gambar 2.1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara kuantitatif, unsur-unsur dengan nilai terendah adalah: Biaya/Tarif, Waktu Penyelesaian, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.

Temuan ini sejalan dengan analisis kualitatif dari kritik dan saran yang diterima, dimana beberapa tema utama yang sering disorot oleh masyarakat antara lain:

- Banyak sekali yang kaya rumah bagus makan enak gaji UMR mendapatkan bantuan sedangkan orang yang mau makan pun susah blm punya rumah anak kurang gizi malah gak dapat bantuan mohon di cek je lokasi jangan andalkan pendamping desa karna pendamping PKH desa banyak yang suka suka klu suka di pilih klu gak suka gak di pilih saya mendengarkan keluhan kesah orang miskin sampai menangis;
- Mohon di Tambahkan Petugas Repsesionis, Agar Lebih Mudah Tamu Untuk Mendapatkan Informasi . Terima Kasih;
- Terus terapkan 5s dalam melayani Masyarakat;

- Sosialisasi ke desa2 lebih sering di lakukan, agar masyarakat tau informasi-informasi terbaru;
- Sudah sangat baik cuma untuk kami yg berada didaerah kartasura bila ingin memperbarui masalah kis sangat jauh kantor dinas sosialnya;
- Mungkin bisa kerjasama dengan BPJS Kab. Untuk memberikan titik pelayanan di lingkungan pelayanan Dinas Sosial. Agar warga untuk mengurus KIS bisa satu Lokasi diluar MPP;
- Biayanya gratis, walaupun desil saya 6-10, tetapi pelayanan ramah dan penjelasan mudah dipahami;
- Pelayanan dengan cepat dan akurat dan tepat sasaran agar semakin mudah dalam membantu masyarakat yang benar² membutuhkan;

Atas dasar temuan tersebut, DINAS SOSIAL menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai IKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan adalah pada unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang:

Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melakukan review terhadap standar pelayanan	Triwulan I	Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
2	Biaya/Tarif	Menginformasikan pelayanan gratis kepada pengguna layanan	Triwulan I	Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
3	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi layanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Triwulan I	Bidang dan Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan DINAS SOSIAL selama beberapa periode terakhir dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Grafik ini menggabungkan data historis yang diarsipkan dengan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memberikan gambaran yang komprehensif.



Gambar 2.2. Grafik Tren Nilai SKM

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM cenderung stabil dengan pola yang fluktuatif dari periode ke periode. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa DINAS SOSIAL telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

BAB III
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh DINAS SOSIAL periode SEMESTER II TAHUN 2025 (2025) menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan, seperti dapat terlihat pada ringkasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	87.39
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87.00
3	Waktu Penyelesaian	86.36
4	Biaya/Tarif	83.96
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86.84
6	Kompetensi Pelaksana	87.34
7	Perilaku Pelaksana	88.66
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	86.68
9	Sarana dan Prasarana	86.60

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan. DINAS SOSIAL telah menyusun dan menindaklanjuti rencana perbaikan berdasarkan temuan pada periode tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut

/tNo	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Biaya/Tarif	Menginformasikan pelayanan gratis kepada pengguna layanan	Sudah	Deskripsi: Melakukan publikasi terkait biaya/tarif baik secara daring maupun secara luring. Hambatan: -	Ada
2	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi layanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dengan Melakukan penambahan SDM/Petugas Pelayanan	Sudah	Deskripsi: Telah dilaksanakan penambahan SDM / Petugas Pelayanan. Hambatan: Luas Ruang Pelayanan yang kecil, membuat para penerima manfaat kurang nyaman.	Ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melakukan Review terhadap Standar Pelayanan / SOP dengan peningkatan kompetensi SDM	Sudah	Deskripsi: Melaksanakan Koordinasi dengan petugas penerima aduan, petugas layanan serta pilar-pilar sosial yang bertugas di lapangan dalam menerima aduan dari Masyarakat serta mekanisme penanganan aduan yang baik, cepat dan solutif pada tanggal Hambatan: -	Ada

BAB IV KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Januari s.d. Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 201 orang mengisi SKM pada DINAS SOSIAL. Dari beberapa layanan yang ada, Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial menjadi layanan dengan pengguna terbanyak, terlihat dari jumlah responden yang mengisi survei yaitu 45 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di DINAS SOSIAL, secara umum mencerminkan tingkat kualitas Baik (B) dengan nilai SKM 87.6. Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan pola yang stabil.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/Tarif, Waktu Penyelesaian, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, DINAS SOSIAL telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (3 dari 3 rencana).



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo,

dr. YUNIA WAHDIYATI, M.Si.
NIP. 197506072006042020

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN DINAS SOSIAL

A. IDENTITAS RESPONDEN			
Jenis Layanan:			
Tanggal Menerima Layanan:			
Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Pendidikan: <input type="checkbox"/> Tidak Sekolah <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3		Usia: <input type="checkbox"/> < 17 tahun <input type="checkbox"/> 17-25 tahun <input type="checkbox"/> 26-34 tahun <input type="checkbox"/> 35-44 tahun <input type="checkbox"/> 45-54 tahun <input type="checkbox"/> 55-65 tahun <input type="checkbox"/> >65 tahun	
Pekerjaan: <input type="checkbox"/> ASN <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Petani/Nelayan <input type="checkbox"/> Pekerja Lepas/Freelance	<input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)			
<input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik <input type="checkbox"/> Disabilitas Intelektual		<input type="checkbox"/> Disabilitas Mental <input type="checkbox"/> Disabilitas Sensorik	

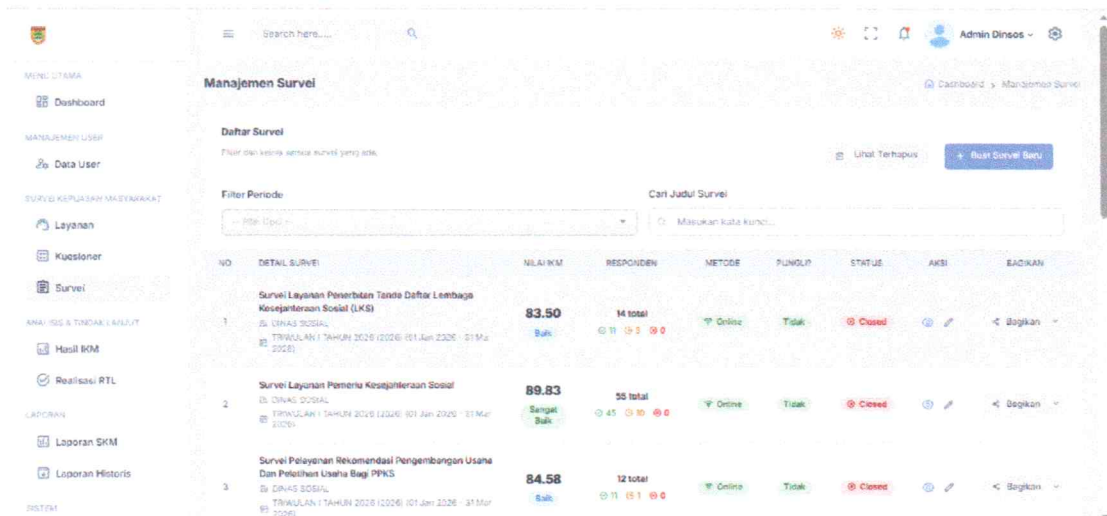
A. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1. Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	6. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
2. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	7. Petugas melayani saya dengan ramah a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
3. Layanan yang diberikan sudah tepat waktu a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	8. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
4. Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	9. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
5. Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	

Kritik dan Saran:

2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)

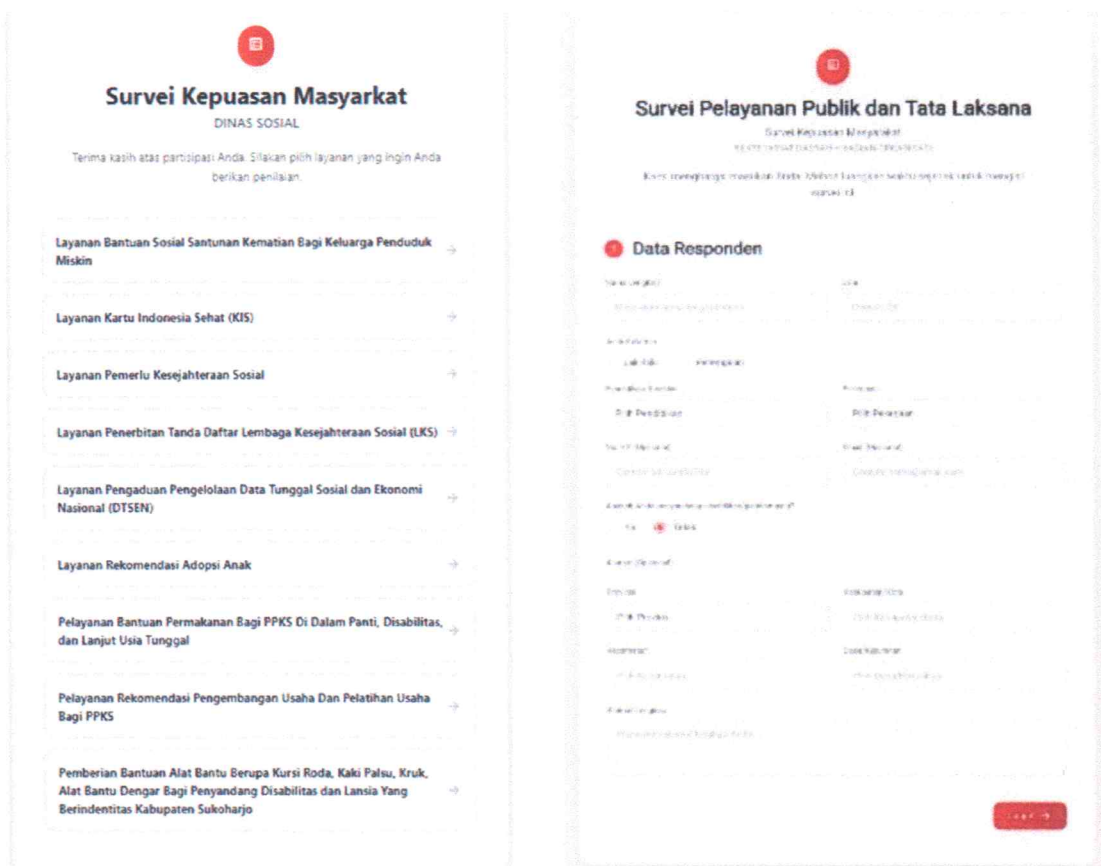
a. Tangkapan Layar melalio Laptop/PC



The screenshot shows a web dashboard titled "Manajemen Survei". On the left is a sidebar menu with categories: MENU UTAMA (Dashboard), MANAJEMEN USER (Data User), SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (Layanan, Kuesioner, Survei), ANALISIS & TINDAK LANJUT (Hasil SKM, Realisasi RTL), LAPORAN (Laporan SKM, Laporan Historis), and SISTEM. The main content area is titled "Manajemen Survei" and includes a search bar, a "Daftar Survei" section with a "Buat Survei Baru" button, and a table of surveys. The table has columns for NO, DETAIL SURVEI, NILAI/IKM, RESPONDEN, METODE, PUNGUT, STATUS, AKSI, and BACIKAN. Three surveys are listed:

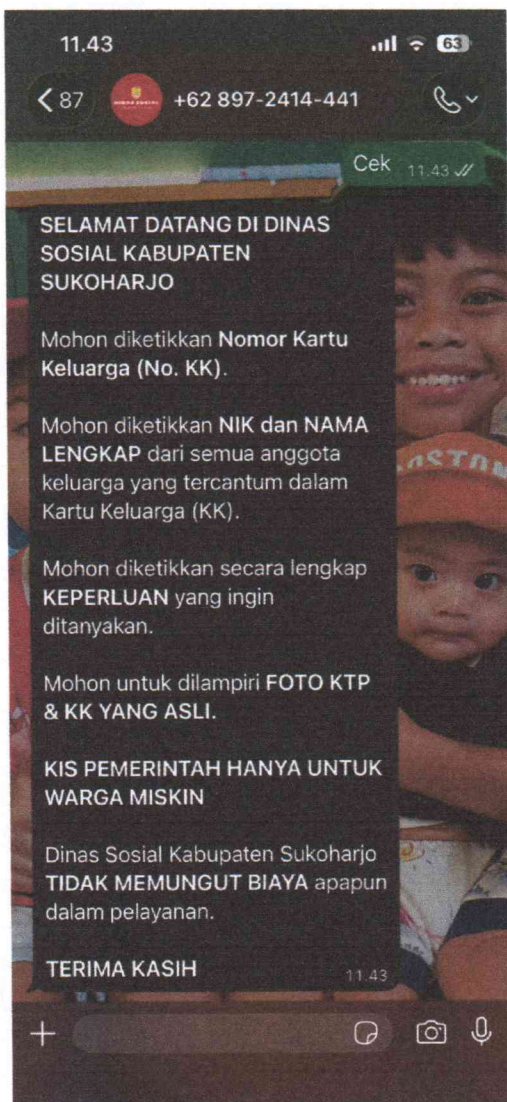
NO	DETAIL SURVEI	NILAI/IKM	RESPONDEN	METODE	PUNGUT	STATUS	AKSI	BACIKAN
1	Survei Layanan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Di DINAS SOSIAL TRIWULAN I TAHUN 2020 (2020) (01 Jan 2020 - 31 Mar 2020)	83.90 Sangat Baik	14 total 0 11 0 3 0 0	Online	Tidak	Closed	[Edit] [Hapus]	< Bagikan
2	Survei Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial Di DINAS SOSIAL TRIWULAN I TAHUN 2020 (2020) (01 Jan 2020 - 31 Mar 2020)	89.83 Sangat Baik	55 total 0 45 0 10 0 0	Online	Tidak	Closed	[Edit] [Hapus]	< Bagikan
3	Survei Pelayanan Rekomendasi Pengembangan Usaha Dan Pelatihan Usaha Bagi PPKS Di DINAS SOSIAL TRIWULAN I TAHUN 2020 (2020) (01 Jan 2020 - 31 Mar 2020)	84.58 Sangat Baik	12 total 0 11 0 1 0 0	Online	Tidak	Closed	[Edit] [Hapus]	< Bagikan

b. Tangkapan layer melalui HP



3. Dokumentasi terkait Pelaksanaan Realisasi Tindak Lanjut (RTL)

- a. Biaya/Tarif(Telah dipublikasikan kepada msasyarakat terkait Pembiayaan/ tarif pelayanan)



- b. Waktu Penyelesaian (Telah dilaksanakan penambahan SDM / Petugas Pelayanan dari PPPK Paruh Waktu guna meningkatkan kualitas pelayanan)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Gedung Menara Wijaya Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id, Pos-el bkpsdm@sukoharjokab.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800.1.2.2/2552 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : Bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut 1529:

Nama : DWI PRANOTO
Nomor Induk PPPK : 199406132025211075
Paruh Waktu
Tempat/Tanggal Lahir : SUKOHARJO/ 13 Juni 1994
Jenis Kelamin : PRIA
Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / 2013
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Gaji/Upah : SESUAI DI PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja : DINAS SOSIAL
Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUKOHARJO,

C
a
p

ETIK SURYANI

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia,



SUMINI, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196810211994032010

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
5. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (Melaksanakan Koordinasi dengan petugas penerima aduan, petugas layanan serta pilar-pilar sosial yang bertugas di lapangan dalam menerima aduan dari Masyarakat serta mekanisme penanganan aduan yang baik, cepat dan solutif pada tanggal 6 April 2026)

